

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok
Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181
Email : panwaslubukittinggi@gmail.com

Nomor : 043/PM.01.02/K.SB-13/08/2022
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : **Himbauan**

Bukittinggi, 16 Agustus 2022

Kepada Yth :
Bapak Walikota Bukittinggi

di
Tempat.

Sehubungan dengan surat Himbauan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 271/PM.00.00/K1/08/2022 perihal Surat Himbauan dan Surat Dinas Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Surat 172/PM.01.01/K.SB/08/2022 Perihal yang sama terkait potensi pencatutan nama pejabat atau pegawai di instansi Pemerintah sebagai pengurus/anggota Partai Politik dalam masa tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024, maka kami sampaikan himbauan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi terkait hal di atas sebagai berikut :

1. Memastikan tidak adanya Pencantuman nama Pejabat atau Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Bukittinggi dalam hal ditemukannya pencantuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik;
3. Mengisi form Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus/Anggota Partai Politik dan melampirkan salinan KTP Elektronik yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Bukittinggi (Form terlampir)

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,

RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan Kepada Yth:
1. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu
Nomor : 012/PM.01.02/K.SB.12/08/2022
Tanggal : 16 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol./Ruangan :
Jabatan, Eselon :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi pengurus atau anggota Partai Politik serta tidak berafiliasi terhadap partai politik manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam ancaman atau paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti surat pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan

(.....)